



**LAPORAN INDIVIDU
STUDI LAPANGAN KINERJA ORGANISASI
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

DISUSUN OLEH:

LYDIA GUSMALITA, S. STP, M. Ec. Dev
NIP.198408042002122001
NDH. 22

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN III
BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN
DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023**

**LEMBAR PENGESAHAN
STUDI LAPANGAN KINERJA ORGANISASI**

**PADA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT**

Bandung, Oktober 2023

Disetujui
Pembimbing I



Dra. Sugastuti, S.S., M.M.
Widyaiswara Ahli Utama
NIP. 196307091990032006

Peserta



Lydia Gusmalita, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 198408042002122001

Pembimbing II



Hj. Holijah, S.H., M.H
Widyaiswara Ahli Madya
NIP. 196909071996032004

**MENGESAHKAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Prof. Dr. H.M. Edwar Juliartha, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP 197507071997031003

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga bisa menyelesaikan tugas Studi Lapangan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan baik dan lancar, dalam rangka memenuhi tugas Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan hasil Studi Lapangan (STULA) ini semoga bisa memberikan manfaat bagi peserta pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Banyak hasil positif yang dapat kita peroleh dan bisa diadopsi dalam peningkatan pelayanan pada instansi kita masing-masing.

Tidak lupa juga Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak/Ibu Widhyaiswara yang telah memberikan bimbingan kepada kami dalam merencanakan, melaksanakan dan menyusun Laporan Studi Lapangan dan tugas-tugas lainnya.
2. Ibu Hj. Holijah, S.H., M.H sebagai pendamping selama melaksanakan Studi Lapangan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Bapak Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan ijin kepada Saya untuk mengadakan Studi Lapangan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Bapak Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta staf yang telah memberikan penjelasan dan gambaran tentang Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan Studi Lapangan ini sehingga selesai tepat pada waktunya.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan, mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan hasil studi lapangan ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Bandung, Oktober 2023
Peserta PKA Angkatan III
BPSDMD Pemprov Sumsel

Lydia Gusmalita, S.STP, M.Ec. Dev

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR DIAGRAM.....	vii
A. PROFIL ORGANISASI	1
B. PROFIL KINERJA PELAYANAN	3
C. ANALISA MASALAH KINERJA PELAYANAN/ORGANISASI	7
D. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	9
1 Terobosan/Inovasi	9
a. Terobosan/Inovasi pada Biro Organisasi Setda Prov. Jawa barat...	9
b. Adopsi Bagi Instansi Peserta.....	10
2 Tahapan Kegiatan	11
3 Sumberdaya (Peta dan Pemanfaatan)	12
4 Manajemen Resiko.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	14
LAMPIRAN.....	15

DAFTAR TABEL

1.1.	Capaian Aspek/Indikator Kinerja Biro Organisasi Setda Pemprov Jawa Barat	7
1.2.	Identifikasi Stakeholder	12

DAFTAR GAMBAR

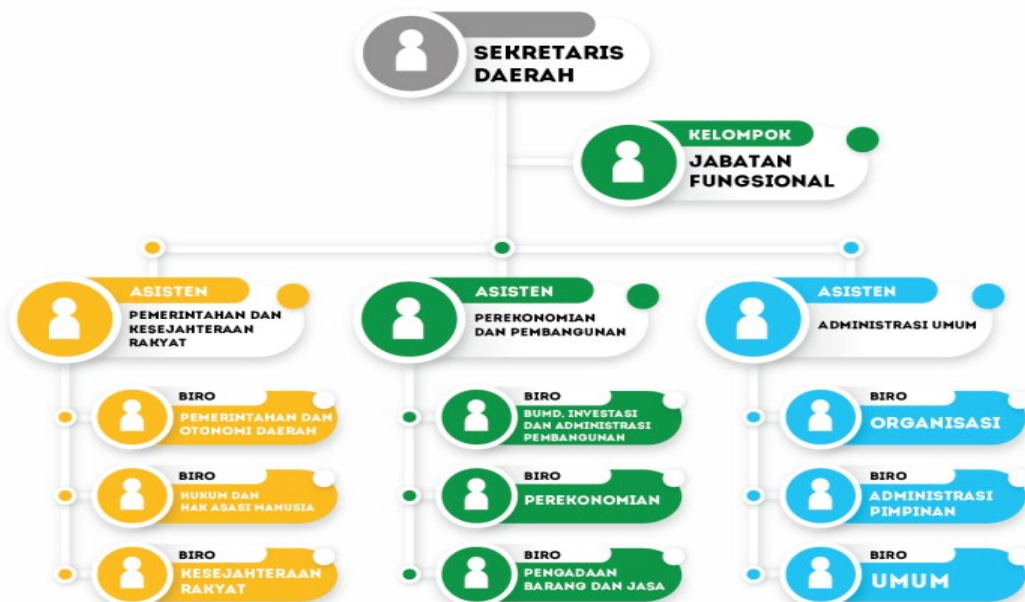
1.1.	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.....	1
1.2.	<i>Core Business</i> Sekretaris Daerah... ..	4
1.3.	Tahapan Pembuatan Aplikasi JAPATI.....	12

A. Profil Organisasi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, tugas pokok Sekretariat Daerah adalah merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengkoordinasian administratif, membina, mengendalikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Selanjutnya Ayat (2) menguraikan fungsi Sekretariat Daerah adalah pada:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi;
2. penyelenggaraan koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
3. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
4. penyelenggaraan administrasi Sekretariat Daerah Provinsi;
5. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi; dan
6. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat



Sumber: RENSTRA SETDA TAHUN 2024-2026 PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang luas dan kompleks tersebut, Sekretariat Daerah di dukung oleh 3 (tiga) unit eselon Ib yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan umum, koordinasi, dan supervise perangkat daerah di sesuai dengan ruang lingkup asisten, serta 9 (Sembilan) Unit Eselon IIa yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang hukum dan hak asasi manusia, meliputi perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
4. Biro Perekonomian mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang perekonomian, meliputi sumber daya alam, ketahanan pangan dan pertanian, serta sarana perekonomian yang menjadi kewenangan Provinsi;
5. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), investasi daerah dan administrasi pembangunan, meliputi BUMD Lembaga keuangan, Badan Layanan Umum Daerah, BUMD non lembaga keuangan, investasi daerah dan administrasi pembangunan;

6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang pengadaan Barang dan Jasa, meliputi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan;
7. Biro Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang organisasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja serta tatalaksana yang menjadi kewenangan Provinsi;
8. Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang administrasi pimpinan, meliputi rumah tangga, materi dan komunikasi pimpinan serta keprotokolan;
9. Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dalam hal penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan asset dalam hal pemberian pelayanan pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja, serta bidang tata usaha dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan pada lingkup Sekretariat Daerah.

B. Profil Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Peran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi adalah pada perumusan kebijakan umum daerah provinsi. Peran ini, memberikan kontribusi optimal pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kontribusi peran ini tergambarkan dalam pencapaian kinerja setda yang sangat baik melalui pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan proyeksi tahun 2022 terealisasi pada predikat A.

Gambar 1.2.
Core Business Sekretariat Daerah



Sumber: RENSTRA SETDA TAHUN 2024-2026 PROV. JAWA BARAT

Secara umum, sasaran strategis mengarah pada dua klasifikasi yaitu pada pemastian kualitas kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta pada pelaksanaan implementasi kebijakan. Pada pemastian kualitas kebijakan, sasaran strategis ditetapkan dengan kalimat “meningkatnya kualitas kebijakan”. Sasaran ini difokuskan pada kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sehingga tolok ukur pencapaiannya diamanatkan kepada tiga biro yaitu Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, serta Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan. Secara teknis, kinerja ketiga biro tersebut adalah untuk memastikan bahwa proses perumusan kebijakan dari mulai perencanaan hingga evaluasi dipenuhi dan dipatuhi. Adapun pengukuran didasari pada perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

Kemudian, pada pemastian implementasi kebijakan dilakukan dengan menetapkan empat sasaran, antara lain:

1. meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang ditetapkan sebagai dukungan pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu “terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih, dan akuntabel” dan merupakan penerapan dari kebijakan terkait reformasi

birokrasi. Adapun pencapaiannya diamanatkan kepada lima biro yaitu Biro Hukum dan HAM, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Biro Organisasi. Pengukuran yang menjadi tolok ukur pencapaiannya didasarkan pada perhitungan evaluasi penerapan reformasi birokrasi di delapan area perubahan sebagaimana dilakukan oleh KemenPAN & RB;

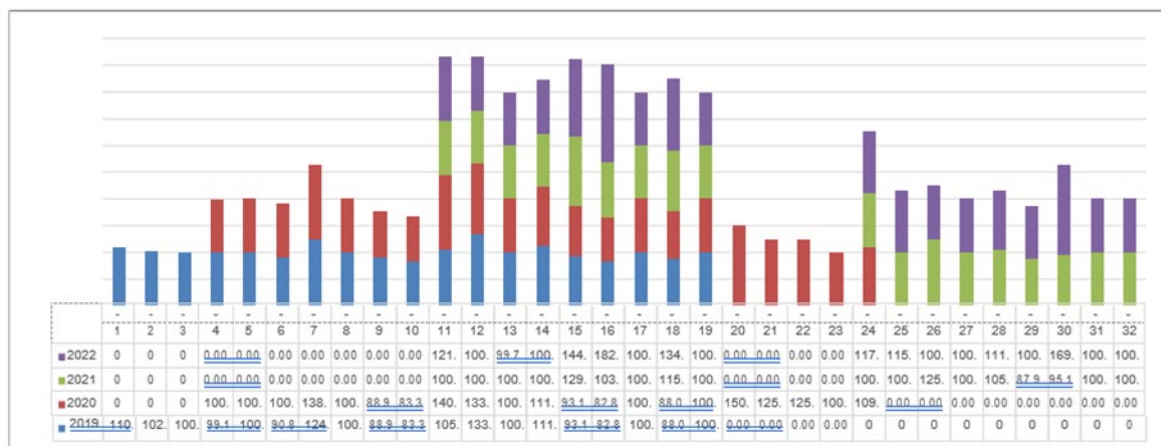
2. meningkatnya kualitas pembinaan, pemahaman pengamalan keagamaan yang ditetapkan sebagai dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu “meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi”. Kinerja ini merupakan implementasi dari kebijakan terkait kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama. Adapun pencapaiannya, diamanatkan hanya kepada Biro Kesejahteraan Rakyat yang mampu fungsi pembinaan bidang keagamaan;
3. diusulkannya calon daerah otonomi baru yang merupakan kinerja pendukung terhadap pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu “terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan”. Kinerja ini merupakan implementasi kebijakan pimpinan dalam pemekaran wilayah untuk menjamin terjadinya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Pencapaiannya diamanatkan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan pengukuran didasarkan kepada kebijakan yang mengatur syarat pemekaran wilayah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000;
4. meningkatnya kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kinerja pendukung terhadap pencapaian sasaran pembangunan “terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif”. Inipun merupakan implementasi terhadap kebijakan pimpinan yang menekankan urgensi kolaborasi untuk pembangunan yang efektif dan efisien. Pencapaian sasaran ini diamanatkan hanya kepada Biro Pemerintahan dan

Otonomi Daerah dengan pengukuran didasarkan kepada kebijakan yang mengatur tentang efektifitas kerjasama daerah;

5. meningkatnya kualitas layanan sekretariat daerah yang merupakan implementasi dari kebijakan tugas pokok dan fungsi untuk memastikan kinerja setda berjalan secara optimal. Kinerja ini merupakan kinerja pendukung bagi pencapaian sasaran setda yang lainnya. Adapun pencapaiannya diamanatkan kepada Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum dengan pengukuran melalui survey kepuasan.

Secara rata-rata kinerja SETDA PEMPROV JABAR dalam empat tahun terakhir menunjukkan kondisi yang memuaskan dengan capaian sebesar 103,5%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Diagram 1.1.
Capaian Indikator Kinerja Setda Prov Jabar Tahun 2019-2022



Sumber: RENSTRA SETDA TAHUN 2024-2026 PROV. JAWA BARAT

Pada Biro Organisasi, capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1.
Capaian Aspek/Indikator Kinerja Biro Organisasi SETDA PEMPROV JABAR

No	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Penguatan Organisasi	Nilai	2.08	2.08	N/A	N/A	N/A	1.85	1.85	N/A	N/A	
2	Nilai Penataan Organisasi	Nilai	2.22	2.22	N/A	N/A	N/A	1.85	1.85	N/A	N/A	
3	Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4.1	4.1	4.06	4.18	4.3	3.82	3.82	5.26	6.23*	
4	Nilai Penataan Tata Laksana	Nilai	3.62	3.62	3.2	3.3	3.4	3	3	3.31	6.2*	
5	Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A*	
6	Nilai Manajemen Perubahan	Nilai	3.69	3.69	3.45	3.55	3.65	3.25	3.25	3.97	4.92*	
7	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	N/A	N/A	3.94	4.06	4.18	N/A	N/A	3.75	7.09*	

Sumber: RENSTRA SETDA TAHUN 2024-2026 PROV. JAWA BARAT

Bisa dilihat dari tabel di atas bahwa kinerja Biro Organisasi Setda Pemprov Jawa Barat setiap tahun terus meningkat. Tahun 2022 biro Organisasi Setda Pemprov Jabar dapat mencapai semua target yang ditetapkan.

C. Analisa Masalah Kinerja Pelayanan Organisasi

Di dalam pelaksanaan fungsi "penerapan tata kelola pemerintahan yang baik" beberapa permasalahan yang diperoleh berkaitan dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap enam area perubahan yang berada dalam kewenangan fungsi setda. Enam area tersebut adalah manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, deregulasi kebijakan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

1. Area manajemen perubahan

Pada penerapan manajemen perubahan, budaya kinerja yang baik belum merata terjadi pada seluruh perangkat daerah. Hal ini diperlihatkan dari hasil evaluasi penerapan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Tahun 2021 yang pada area ini diperoleh nilai 4,07 poin dari nilai maksimal 5,00 poin. Salah satu pendorongnya adalah penerapan core value berAKHLAK baru mencapai 73,12 poin dari total nilai 100 poin dimana baru enam dari 37 perangkat daerah (16%) yang memperoleh kategori baik.

Disamping itu, perubahan birokrasi pun belum terinternalisasi secara menyeluruh. Hal ini diperlihatkan dari baru 81% dari total perangkat daerah termasuk ke dalam unit kerja dengan reformasi birokrasi dalam rentang kategori BB dan B. Hal ini mengandung arti bahwa reformasi birokrasi diterapkan namun belum memuaskan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa upaya yang telah dilakukan setda dalam menginternalisasi perubahan budaya pada perangkat daerah belum cukup.

2. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Pada area penataan dan penguatan organisasi, penerapan organisasi berbasis kinerja dinilai belum maksimal. Hal ini ditandai oleh hasil evaluasi KemenPANRB Tahun 2021 dengan nilai perolehan 5,09 poin dari nilai maksimal 7,50 poin. Hasil ini didorong oleh bahwa penentuan struktur organisasi dinilai belum didasarkan pada arsitektur kinerja atau proses bisnis. Kondisi eksisting bahwa arsitektur kinerja telah dapat memperlihatkan adanya ketidaktepatan fungsi pada suatu struktur unit kerja namun tindak lanjut dari penemuan tersebut belum diaplikasikan.

3. Area Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana berkaitan dengan mekanisme kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, penerapannya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dinilai belum maksimal ditandai dengan hasil evaluasi KemenPANRB Tahun 2021 yang memberikan nilai 4,34 dari nilai total 6,25 poin. Penilaian ini didorong oleh belum jelasnya relasi konseptual antara proses bisnis dan pengukuran kinerja. Lalu, keterhubungan antara proses bisnis dan prosedur standar operasional (SOP) juga belum dirumuskan.

4. Area Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dinilai “memuaskan” yang diperlihatkan dari hasil evaluasi KemenPANRB Tahun 2021 dengan nilai 85,01 poin atau kategori A. Perolehan ini sudah baik namun belum sesuai dengan harapan. Beberapa hal yang masih memerlukan optimalisasi adalah tingkat akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain daripada itu, kualitas pelaporan kinerja yang belum informatif belum dapat memberikan dampak

signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai target kinerja selanjutnya.

5. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan publik dinilai memiliki kualitas tertinggi dengan kategori A. Sehingga pelayanan publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berada dalam zona hijau. Namun hasil evaluasi KemenPANRB memperlihatkan bahwa pelayanan publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum ditingkatkan secara maksimal. Dari data penilaian Tahun 2021, diperoleh nilai 5,08 poin dari total maksimal sebesar 6,25 poin. Adapun beberapa aspek yang dinilai memerlukan peningkatan antara lain adalah pengelolaan pengaduan dan konsultasi serta inovasi pelayanan publik.

D. Strategi Penyelesaian Masalah

1. Terobosan/Inovasi

Adopsi sebuah inovasi atau perubahan memiliki konsekuensi munculnya kebutuhan kompetensi baru yang harus dikuasai siapapun yang terdampak atas inovasi tersebut. Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai pada unit kerja dimana perubahan dilakukan atau stakeholders yang terdampak atas proyek perubahan peserta pelatihan. Identifikasi dan penjelasan ini disertai dengan strategi untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan tersebut. Rencana strategi pengembangan potensi diri kompetensi untuk adopsi aksi perubahan paling tidak memuat siapa pihak yang terdampak proyek perubahan, kompetensi baru apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana cara (strategi) pengembangannya.

a. Terobosan/Inovasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat

Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mendukung pelaksanaan Pembangunan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Inovasi unggulan pada Biro Setda Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah:

- a. *Sidebar Mobile Apps* adalah aplikasi tata kelola persuratan berbasis elektronik yang efektif, digunakan oleh seluruh jenjang aparatur di

lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis web dan apps yang tersedia di *playstore* maupun *Appstore*;

- b. aplikasi Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK), merupakan aplikasi e kinerja ASN sesuai dengan capaian kinerja individu sesuai dengan capaian kinerja Perangkat Daerah masing masing ASN;
- c. Aplikasi Kehadiran Mobile (KMOB);
- d. Aplikasi SURABI (Sistem Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Terintegrasi) merupakan system informasi untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi implementasi RB yang dilengkapi dengan petunjuk teknis.
- e. Portal Jabarprov adalah Portal yang menyediakan informasi resmi, akses ke berbagai layanan publik dan tempat menyampaikan aspirasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- f. JAPATI (Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi) merupakan aplikasi e-sakip yang menyediakan informasi manajemen kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan implementasi pengelolaan kinerja organisasi, *cascading* kinerja dilakukan secara berjenjang dengan masing masing pengampu dari level *ultimate outcome*, *intermediate outcome*, *immediate outcome* sampai dengan level output. Japati bisa diakses bukan hanya oleh perangkat daerah tetapi juga masyarakat agar dapat memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah.

b. Adopsi Inovasi bagi Instansi Peserta

Setelah melakukan studi lapangan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, didapatkan beberapa poin yang dapat diadopsi dalam rangka rancangan aksi perubahan, antara lain melakukan reformasi birokrasi, dimana tahapannya dimulai dari penyusunan manajemen kinerja ke dalam proses bisnis. Tujuan dibuatnya proses bisnis ini adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang terstruktur dan terukur untuk mengelola dan meningkatkan efisiensi operasional serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Proses bisnis diturunkan ke dalam arsitektur kinerja yaitu kerangka logis kinerja sistematis mulai dari *ultimate outcome* sampai dengan output yang disusun berdasarkan permasalahan dan teori. Selanjutnya arsitektur kinerja ini diturunkan lagi ke

dalam cascading kinerja dan crosscutting kinerja. Penjenjangan kinerja dilakukan secara digital melalui pengembangan fitur aplikasi JAPATI (Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi).

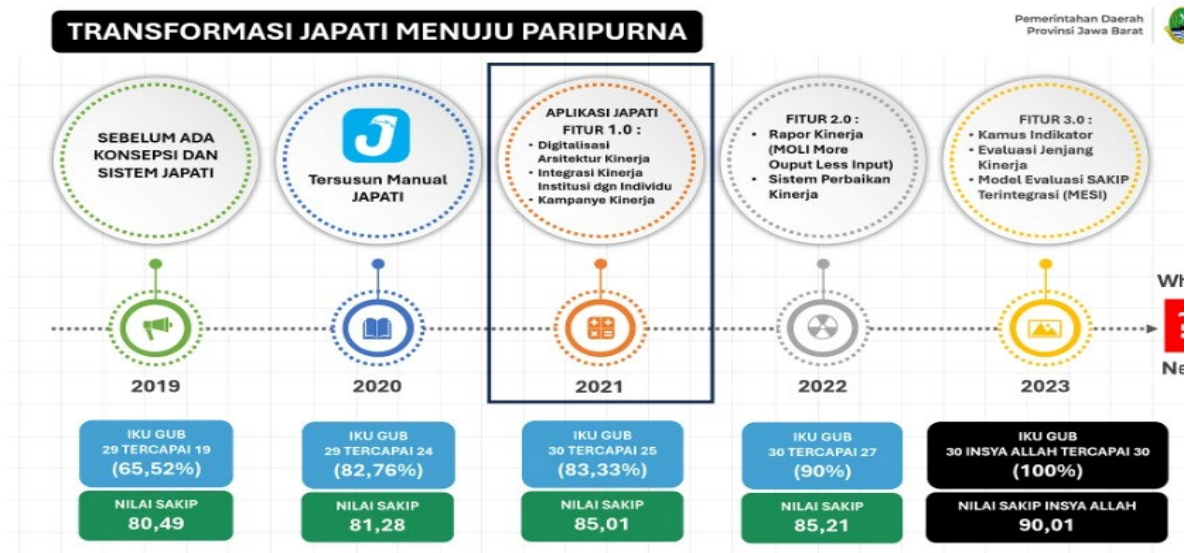
Aplikasi JAPATI ini berisi informasi tentang Kinerja Gubernur, kinerja Perangkat Daerah, arsitektur kinerja Perangkat Daerah, arsitektur kinerja cross cutting. Semua informasi disediakan dengan lengkap dan *up to date*. Dengan adanya aplikasi ini, memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Unit Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja satuan / unit kerja pada khususnya dan kinerja Instansi pada umumnya. Informasi yang dihasilkan dari aplikasi ini dapat diakses oleh publik, dengan harapan masyarakat dapat turut serta memantau, menilai dan memberikan masukan kepada Instansi Pemerintah bilamana terdapat kinerja kurang maksimal. Sistem ini juga bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.

Dalam pencapaian tujuan, Pemerintah Kabupaten Merangin sudah melakukan manajemen kinerja melalui penjenjangan kinerja, meskipun belum semua cascading kinerja diturunkan sampai ke level individu. Manajemen kinerja di Kabupaten Merangin belum dilakukan secara digitalisasi dan belum terintegrasi.

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan pembuatan aplikasi JAPATI oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dimulai sejak tahun 2020 dengan menyusun manual JAPATI, hingga pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.3.
Tahapan Pembuatan Aplikasi JAPATI



3. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatannya)

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap inovasi/proyek perubahan yang sedang dilakukan oleh performer stakeholder yang akan terlibat dalam proyek perubahan ini terdiri dari stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Adapun identifikasi stakeholder yang terkait inovasi **JAPATI** ini seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Identifikasi Stakeholder

Stakeholder Internal	Stakeholder Eksternal
Sekretaris Daerah Prov. Jawa Barat	Gubernur Jawa Barat
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Jawa Barat	Tim <i>agile</i> antar bidang
Kepala Biro Setda Prov. Jawa Barat	Tim <i>agile</i> lintas perangkat daerah
Tim internal bidang	Tim <i>agile</i> lintas instansi
	Masyarakat

4. Manajemen Resiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi

atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP, salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

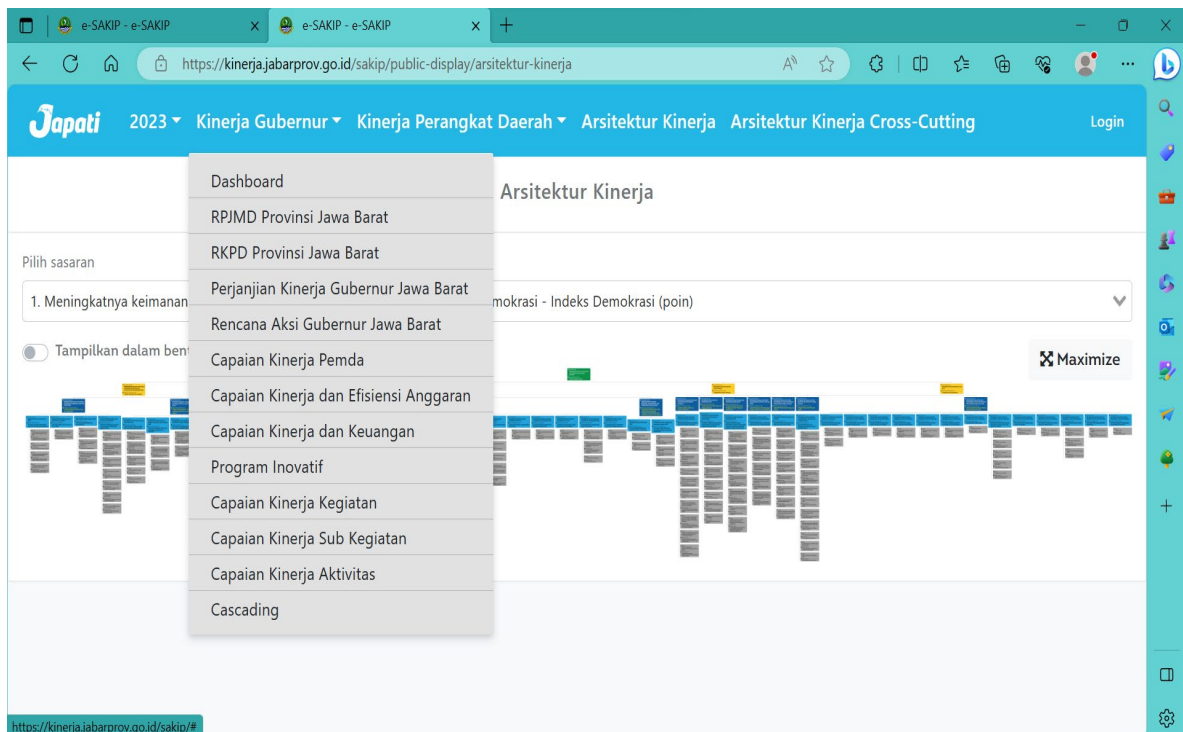
- Republik Indonesia. 1950. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2020. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2021. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Renstra Setda Pemprov Jawa Barat tahun 2024-2026
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),

DAFTAR DIAGRAM

1.1.	Capaian Indikator Kinerja Setda Prov. Jabar Th. 2019-2022.....	6
------	--	---

LAMPIRAN

Aplikasi JAPATI







Laporan Studi Lapangan Kinerja Organisasi

**Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat**

DISUSUN OLEH :

1. KETUA : Dr. DIAN ARYOGO SUTOYO, M. Psi
2. WAKIL KETUA : SEPTA MARUS EKA PUTRA, S.H, M.H
3. SEKRETARIS : LYDIA GUSMALITA, S.STPM.Ec. Dev
4. ANGGOTA :
 1. ARYA DEWANTARAS.E,M.Si
 2. IMAM ILHAM, S.H, M.H
 3. ALEXANDER, S.IP.M.Si
 4. JUFRIANSYAH, S.STPM.Si
 5. DERRY ARIADI, S.H, M.H
 6. FETRI ASWANTI, S.TM.Si, M.
 7. ARDHILES P. RAJA SIAHAAN, S.T
 8. HENDRI WARDISON, S.PM.Si
 9. PUTRI DAMAYANTI, S.Psi, M.M
 10. SRI ULFATI, S.H
 11. BRAM ABRAHAM, SE
 12. NUR AINUN TANJUNG, S.Ag



Tugas dan Fungsi Biro Organisasi

Tugas

menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang organisasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja serta tatalaksana yang menjadi kewenangan Provinsi

Fungsi

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang organisasi;
- b. penyelenggaraan administrasi Biro Organisasi;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro Organisasi; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Empat Sasaran Implementasi Kebijakan

01

Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Smart, Bersih, Dan Akuntabel

02

Meningkatnya Keimanan Dan Kerukunan Umat Beragama Dalam Kerangka Demokrasi '

03

Terbentuknya Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan

04

Terwujudnya Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Pihak Lainnya Dalam Pembangunan Yang Sinergis Dan Integratif '

Tabel 1.1
Capaian Aspek/Indikator Kinerja Biro Organisasi SETDA PEMPROV JABAR

[illegible]

No	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Provinsi Jawa Barat											
6	Nilai Manajemen Perubahan	Nilai	3.69	3.69	3.45	3.55	3.65	3.25	3.25	3.97	4.92*	
7	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	N/A	N/A	3.94	4.06	4.18	N/A	N/A	3.75	7.09*	

Key Success Factors

01

Komitmen tinggi
dari seluruh
Stakeholder

03

Pembangunan Jejaring
Kerja dan Kolaborasi
Pemangku Kepentingan

02

Kepemimpinan
Transformasional
dan Inovatif

04

Pemanfaatan Teknologi
Digital



Lessons Learned Hasil STULA

01

Planning and budgeting

Melalui pelaksanaan
“Program Penataan
Organisasi”

02

Pemanfaatan Teknologi Informasi

- ✓ Sidebar Mobile Apps (tatakelola persuratan)
- ✓ TRK (Aplikasi E- Kinerja)
- ✓ KMOB (aplikasi Kehadiran Mobile)
- ✓ SURABI (Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi)
- ✓ Portal JABARPROV
- ✓ JAPATI (Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Terintegrasi)

Lessons Learned Hasil STULA (lanjutan)

03

Sistem Kerja Aparatur

- ✓ Tim Internal Bidang
- ✓ Tim Agile antar Bidang
- ✓ Tim Agile Lintas Perangkat Daerah
- ✓ Tim Agile Lintas Instansi

04

Manajemen Kinerja

- ✓ Manajemen Proses Bisnis
- ✓ Membangun Arsitektur Kinerja
- ✓ Menyusun Cascading kinerja
- ✓ Menyusun Crosscutting kinerja lintas

05

Manajemen Resiko

- Membuat komite manajemen resiko :
- ✓ Komite Eksekutif
 - ✓ Komite Pelaksana
 - ✓ Biro/bagian



Lesson Learned Hasil lanjutan

06

Peran Kepemimpinan

- ✓ Mendorong Kreatifitas dan budaya inovasi
- ✓ Menciptakan lingkungan kerja yang dinamis
- ✓ Mekanisme kerja dinamis
- ✓ Mengembangkan jaringan dan kolaborasi

07

Inovasi Pelayanan

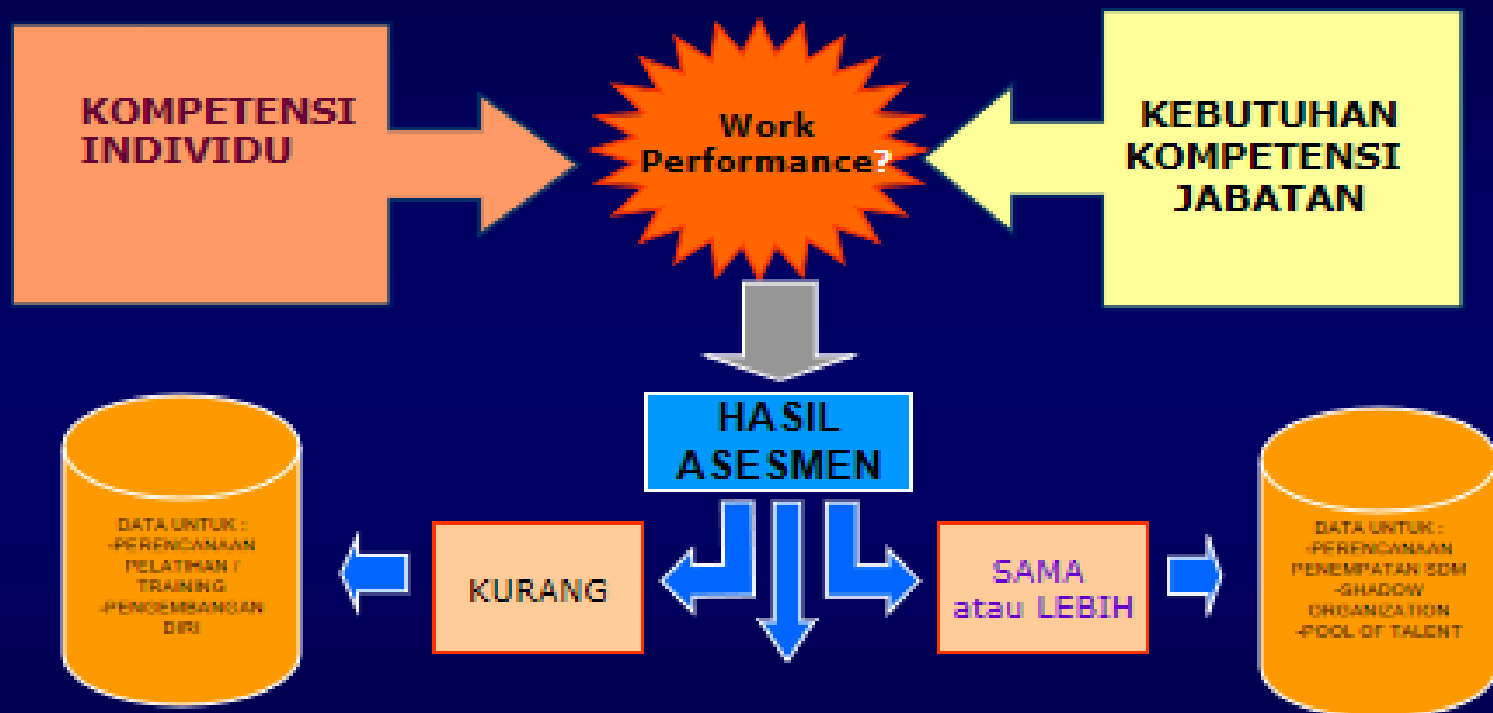
- ✓ Sidebar Mobile Apps
- ✓ Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK)
- ✓ KMOB (Aplikasi Kehadiran Mobile)
- ✓ Aplikasi Surabi (Sistem pengukuran Indeks Reformasi Birokasi Terintegrasi)
- ✓ Portal Jabar Prov
- ✓ JAPATI (Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Terintegrasi)

08

Kompetensi dan Pemberdayaan SDM

- ✓ Penyederhanaan Birokrasi
- ✓ Penyederhaan Struktur Organisasi dan tata kerja
- ✓ Pendefinisian Peran Perangkat Daerah
- ✓ Manajemen Talenta dengan melakukan inovasi SIM Jawara

IMPLEMENTASI ASESMEN POTENSI & KOMPETENSI SDM

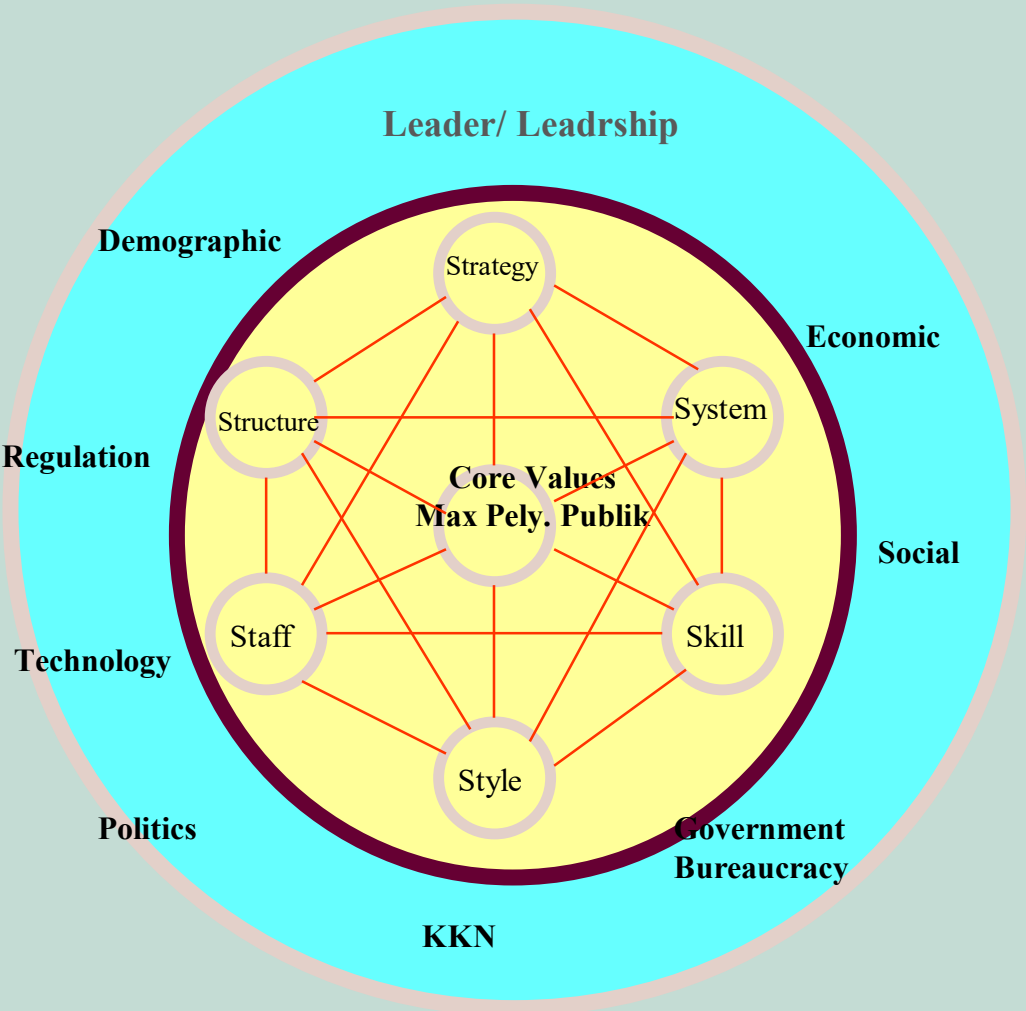


MODEL MANAJEMEN TALENTA



**DISRUPTION
ERA**

Volatile, Uncertain,
Complex, Ambiguous



FINAL LEASON LEARN COMPARATIF STUDY ORGANISASI (JAWA BARAT & SUMATERA SELATAN)

Personal

- ✓ Resiliensi
- ✓ Responsif dan terbuka terhadap perubahan
- ✓ Inovatif
- ✓ Selalu berusaha mengembangkan diri
- ✓ Memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi

Pengelola SDM

- ✓ Merekrut & mengidentifikasi potensi Talent
- ✓ Membangun keterampilan pegawai
- ✓ Menyusun program pengembangan pegawai
- ✓ Memberikan informasi karier yang jelas

Pimpinan

- ✓ Memperkuat komunikasi dengan pegawai, menjadi role model
- ✓ Memberi spirit
- ✓ Memberikan arahan yang jelas
- ✓ Memberi apresiasi kepada pegawai

Organisasi

- ✓ Menarik Talent terbaik
- ✓ Adanya pilihan kerja fleksibel
- ✓ Menyediakan lingkungan kerja yang adil, kompetitif, dan transparan

ORGANIZASIONAL BEHAVIOR



EVALUATION

INPUT:

Raw Input, Instrumental input

Benefit, Impact:

1. Bagi Masyarakat
2. Bagi Daerah: Capaian RB Tematik, IKD

Output:

Lulusan, Capaian Tujuan Pembelajaran

Outcome:

1. Kemanfaatan bagi jabatan (talent pool/management)
2. Kemanfaatan bagi instansi (Kinerja Organisasi, IKU)



Perubahan sistem organisasi dan tata kerja di Pemprov Jawa Barat berhasil dengan baik karena mendapatkan dukungan penuh peran kepemimpinan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat

“

**DIGITALISASI
ADALAH TOOLS,
BUKAN TUJUAN.**

**KEPUASAAN PUBLIK
ADALAH TUJUAN
SEBENARNYA.**

”

